HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS MENONTON IKLAN POLITIK DI TELEVISI DENGAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MUSLIM DUSUN KRAJAN DESA TIRTOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PILIHAN PRESIDEN 2014

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Komunikasi Islam

Disusun Oleh :

Nurul Hidayati

NIM : 10210043

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA

YOGYAKARTA

2015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 295.a /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

HUBUNGAN INTENSITAS MENONTON IKLAN POLITIK DI *TELEVISI* DENGAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MUSLIM DI DUSUN KRAJAN DS TIRTOMARTANI KEC. KALASAN *KAB* SLEMAN DALAM PILIHAN PRESIDEN (PILPRES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: NURUL *HIDAYATI*
NIM/Jurusan	: 102 0043/KPI
Telah dimunaqasyahkan *pada*	: Jumat, 30 Januari 2015
Nilai Munaqasyah	: 82,6 (B+)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan *Kalijaga Yogyakarta.*

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si.
NIP 19661209 199403 1 004

Penguji II,

Drs. Abdul Rozak, *M.Pd.*
NIP 19671006 199403 1 003

Penguji III,

Dra. Hj. Anisah Indriati, M.Si.
NIP 19661226 199203 2 002.

Yogyakarta, 5 Pebruari 2015
Dekan,

Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19570010 199903 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 (0274) 512474. www.uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : NURUL HIDAYATI
NIM : 10210043
Judul Skripsi : HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS MENONTON IKLAN POLITIK PEMILU DI TELEVISI DENGAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MUSLIM DUSUN KRAJAN DESA TIRTOMARTANI KEC. KALASAN KAB. SLEMAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2014

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Mengetahui Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam	Pembimbing
Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si.	**Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si.**
NIP. 19710328 199703 2 001	NIP. 19661209 199403 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hidayati

NIM : 10210043

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Hubungan Antara Intensitas Menonton Iklan Politik Pemilu Di Televisi Dengan Partisipasi Pemilih Pemula Muslim Dusun Krajan Desa Tirtomartani, Kec. Kalasan Kab. Sleman Dalam Pilihan Presiden 2014 adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 21 Januari 2015

Yang menyatakan

Nurul Hidayati

NIM. 10210043

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Hidayati

NIM : 10210043

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengenakan jilbab. Demikian pernyataan ini saya buat, semoga dapat digunakan seperlunya.

Yogyakarta, 21 januari 2015

Yang menyatakan

Nurul Hidayati

10210043

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang telah saya susun ini, saya persembahkan untuk:

- ✓ Orang tua yang selalu mendukung dalam keadaan apapun, bapak Marzuqi dan ibu Turiyah terimakasih atas dukungannya.
- ✓ Kakak Syamsul Ariyadi dan Muhammad Safrodin yang selalu membantu dikala kekurangan, terimakasih atas bantuannya.
- ✓ Untuk saudara-saudara yang telah memberikan do'a dan semangat.
- ✓ Untuk Adi Winarno yang sangat baik.
- ✓ Untuk sahabat seperjuangan Yorin, Kharisma, Vicky, Novitasari dan sahabat lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu semoga esok kita mendapat kesuksesan yang luar biasa.
- ✓ Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

"Real success is determined by two factors. First is faith, and second is action".

"Keberhasilan nyata ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah keyakinan, dan yang kedua adalah tindakan"

(Reza M. Syarief dalam buku 13 Top Secrets Pembuka Pintu Rezeki)

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan anugerah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) dari Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa berada di garis tuntunan-Nya.

Skripsi yang penulis susun berjudul " Hubungan Antara Intensitas Menonton Iklan Politik di Televisi dengan Partisipasi Pemilih Pemula Muslim Dusun Krajan Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dalam Pilihan Presiden 2014" semoga menjadi bukti atas kerja keras dan sumbangan penulis bagi kampus Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang menjadi tempat penulis belajar dan menempuh perkuliaha Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini bukanlah semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Waryono, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Ibu Dra. Anisah Indriati, M.Si selaku Pembimbing Akademik dan penguji ketiga yang selalu memberikan motivasi dan memberikan arahan.
5. Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si selaku Pembimbing skripsi yang dengan teliti telah memberikan ilmu tambahan dan pengetahuan baru bagi saya.
6. Drs. Abdul Rozak, M. Pd selaku penguji kedua
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga serta karyawan atas perhatian dan pelayanan yang diberikan.
8. Keluarga Tercinta, Bapak Marzuqi dan Ibu Turiyah serta Kakak yang selalu memberikan dukungan.
9. Mas Adi Winarno yang senantiasa memberikan panutan yang baik.
10. Teman-teman seperjuangan KPI 2010 khususnya teman-teman tersayang Yorin, Kharisma, Vicky dan semua teman-teman terbaikku. Terimakasih banyak.
11. Bapak Komedi yang senantiasa mendengarkan keluh kesah kami.

12. Teman-teman yang selalu menghibur dikala sedang sedih Novitasari, Hanna Pradita, Een Anjaya, dan teman-teman lainnya terimakasih telah membantuku menghilangkan kesedihan.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan tersusunnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan pada pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terimakasih dengan segala kerendahan hati sebagai koreksi.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Penulis,

Nurul Hidayati

NIM: 10210043

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul hubungan antara intensitas menonton iklan politik di televisi dengan partisipasi pemilih pemula muslim di dusun Krajan, desa Tirtomartani, kecamatan Kalasan kabupaten Sleman dalam Pilpres 2014. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengatahui pengaruh iklan politik dalam partisipasi pemilih pemula di dusun Krajan, desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dalam Pilpres 2014.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa statistik deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Jenis penelitian ini adalah *Explanative Research.* Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 62 Data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data kuesioner dengan menggunakan skala *Likert.* Uji persyaratan analisis menggunakan uji Validitas, uji Reliabilitas. Serta deskriptif tentang pemilih pemula.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa intensitas menonton iklan politik di televisi berpengaruh pada partispasi memilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas menonton iklan politik termasuk dalam kategori sedang. Semua item pertanyaan mengenai intensitas menonton iklan termasuk dalam kategori sedang.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 4
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 6
E. Kajian Pustaka 7
F. Kerangka Teori 10
G. Hipotesis Penelitian 45
H. Metodologi Penelitian 46

BAB II GAMBARAN UMUM PEMILIH PEMULA MUSLIM 49

A. Partisipasi Pemilih di Dusun Krajan 49
B. Pemilih Pemula 50
C. Dusun Krajan 51

BAB III HASIL PENELITIAN 54

A. Hasil Penelitian 54

BAB IV PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul HUBUNGAN INTENSITAS MENONTON IKLAN POLITIK DI TELEVISI DENGAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MUSLIM DUSUN KRAJAN, DESA TIRTOMARTANI, KECAMATAN KALASAN, KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILU PRESIDEN 2014. Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman terhadap istilah dalam judul skripsi ini, maka perlu penulis tegaskan sebagai berikut:

1. Intensitas Menonton Iklan Politik di Televisi

Kata intensitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu intense yang berarti semangat, giat (John M. Echols, 1993: 326). Sedangkan menurut Nurkholif Hazim (2005: 191), bahwa: " Intensitas adalah kebulatan tenaga yang dikerahkan untuk suatu usaha". Dalam hal ini intensitas menonton iklan politik di televisi adalah kegiatan seberapa banyak seseorang dalam menyaksikan iklan politik yang muncul di televisi setiap harinya.

2. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *"participation"* yang memeliki arti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi

tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya[1].

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula ini adalah mereka yang berusia 17-22 tahun, yang untuk pertama kalinya akan berpartisipasi dalam pemilu. Status mereka biasanya adalah pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda.

4. Pemilu

Pemilu merupakan mekanisme politik untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik yang dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu tertentu dengan berdasarkan kepada prosedur yang telah disepakati dan disahkan dalam Undang-Undang (UU) yang sering ditandai oleh adanya peralihan kekuasaan kepemimpinan nasional. Idealnya pemilu dimaksudkan untuk mencari *general will* dalam masyarakat, Pemilu mengedepankan

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi

kuantitas suara sebagai basis utama untuk mengesahkan perubahan kekuasaan yang terjadi.

Jadi Hubungan antara Intensitas Menonton Iklan Politik Pemilu di Televisi dengan Partisipasi Pemilih Pemula Muslim Dusun Krajan, Desa Tiromartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dalam pemilu presiden 2014 adalah Serangkain kegiatan membuat keputusan untuk memilih calon presiden dari melihat tayangan iklan politik di televisi. Hubungan tersebut akankah memiliki dampak pada partisipasi memilih pada pemilih muslim yang baru pertama kali ikut dalam pemilu.

B. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 di Indonesia, maka pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu marak, terlebih pada media televisi. Beberapa partai politik telah gencar melakukan iklan politik dalam upayanya untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiensi agar mendukungnya, seperti: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilah Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional.

Sebagaimana iklan produk atau jasa yang selama ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, iklan politik juga memiliki tujuan yang dapat dikatakan sama yaitu memberikan informasi mengenai partai politiknya, calon presiden dan calon wakil preidennya; selanjutnya setelah memberikan informasi maka iklan juga bertujuan untuk melakukan persuasi atau bujukan. Persuasi yang

dilakukan oleh iklan politik sudah barang tentu adalah agar audiensi memiliki sikap yang baik atau positif terhadap partai politiknya dan berpartisipasi dalam pemilu. Menurut teori *reasoned action*, sikap yang positif akan menimbulkan niat yang kuat, dan akhirnya niat yang kuat tersebut dapat menimbulkan perilaku yang mendukung[2]. Implikasi teori tersebut dalam kaitannya dengan iklan politik adalah, sikap yang positif terhadap iklan politik yang diiklankan dapat menimbulkan niat audiens untuk memiliki partai politik tersebut.Oleh karena itu, iklan politik yang efektif, seharusnya mampu mengubah sikap audiensi dari yang tidak mendukung menjadi mendukung partai politik.

Sebagaimana iklan umumnya, iklan politik bertujuan menciptakan citra serba positif tentang apa yang akan dipasarkan (dalam hal ini partai politik) kepada konsumen (rakyat pemilih) yang intinya adalah bahwa mereka layak dipilih dan bahwa mereka mampu membawa negara dan bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Iklan politik yang dilakukan melalui televisi merupakan kegiatan iklan yang memerlukan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan iklan politik untuk mempengaruhi sikap pemilih pemula sebagai audiens merupakan fenomena memiliki peran strategis bagi partai politik yang bersangkutan.Mengingat iklan politik memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi sikap pemilih pemula sebagai audiens, dan juga memiliki peran penting dalam memenangkan Pemilu; maka penulis termotivasi untuk melakukan kajian empiris mengenai hubungan intensitas menonton iklan politik

[2]Saiffudin Azwar,*Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Edisi Kedua,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 53.

pemilu di Televisi dengan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu presiden 2014.

Tingkat Partisipasi Memilih pada Pilpres 2014 meningkat dari periode sebelumnya yakni tahun 2009. Hal ini disampaikan oleh Bapak selaku Kepala Dukuh di dusun Krajan. Beliau mengatakan bahwa tahun ini antusias memilih masyarakat dusun Krajan meningkat karena menurut masyarakat calon presiden tahun 2014 cukup mengejutkan, berbeda dari periode sebelumnya yang calon presidennya sudah dikenal sejak lama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Intensitas menonton iklan politik pemilih pemula di dusun Krajan?
2. Bagaimana tingkat partisipasi pemilih pemula di dusun Krajan?
3. Apakah Intensitas menonton iklan politik di televisi berhubungan dengan partisipasi pemilih pemula muslim di dusun Krajan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui intensitas menonton iklan politik pemilih pemula di dusun Krajan.
   b. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pemula di dusun Krajan.
   c. Untuk mengetahui hubungan antara intensitas menonton iklan politik di televisi dengan partisipasi pemilih pemula muslim di dusun Krajan.

2. Manfaat penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu komunikasi dan teori-teori komunikasi yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam praktek, khususnya dalam aktivitas yang terkait dengan bidang sosial dan politik.

b. Praktis

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan pemilihan umum.

E. Kajian Pustaka

Penelusuran pustaka terdahulu yang penulis temukan terdapat beberapa karya yang berkaitan dengan partisipasi politik pemilih pemula. Pertama, skripsi yang disusun oleh Wahyu Rahma Dani yang berjudul *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*.Fokus penelitian ini adalah partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data berupa metode observasi metode wawancara metode dokumentasi.Pengambilan data pada responden pemilih pemula di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan aktivis politik sebagai informan penelitian.Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal terbagi dalam bentuk

pemberian suara, kampanye, dan berbicara masalah politik. Tingkat Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yaitu pemberian suara, bentuk partisipasi politik ini dilakukan 95% pemilih pemula yang terdaftar dalam DPT Desa Puguh dan sesuai daftar kehadiran. Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Desa Puguh kecamatan Boja Kabupaten Kendal adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak keluarga, sedangkan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu legislatif tahun 2009 adalah : rasa ingin tahu dan kesadaran politik para pemilih[3].

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agus Muslim yang berjudul *Faktor-Faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar2013*.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana Faktor-faktorPartisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat 2013.Teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data mengenai masalah partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Andir dalam Pilgub Jabar 2013 adalah teori dari Milbrath yang menyatakan partisipasi politik seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu

[3]Wahyu Rahma Dani, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, 2010, abstrak skripsi, diakses dari http://lib.unnes.ac.id/3055/.

dengan adanya studi pustakan dan studi lapangan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilgub Jabar 2013 di Kecamatan Andir masih terbilang kurang baik, karena dari 7872 pemilih pemula yang ada di Kecamatan Andir, hanya ada 4320 pemilih pemula yang datang ke TPS untuk melakukan partisipasi pemberian suara. Faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilgub Jabar 2013 di Kecamatan andir adalah banyaknya rangsangan politik yang diterima oleh pemilih pemula di Kecamatan andir baik lewat media masa, media Televisi, dan diskusi-diskusi politik informal. Faktor pendorong lainnya adalah karakteristik pribadi pemilih pemula di Kecamatan Andir yang punya kesadaran politik yang cukup tinggi. Faktor penghambat yang dialami oleh pemilih pemula di Kecamatan Andir dalam Pilgub Jabar 2013 utamanya sebenarnya adalah kurangnya pendidikan politik yang mereka dapatkan, kurangnya sosialisasi yangmenyeluruh yang sampai kepadamereka, faktor penghambat lain adalah kebijakan induk yang berubah-ubah dalam hal ini yaitu pemerintah yang selalu merubah undang-undang atau mekanisme Pilgub yang membuat pemilih pemula enggan datang ke TPS[4].

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Amul Husni Fadlan yang berjudul *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Ditinjau dari Persepsi Terhadap Citra Partai Politik dan Keterpercayaan Kandidat Presiden*.Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, dengan subjek penelitian sebanyak 300 orang pemilih pemula.Penelitian ini bertujuan untuk

[4]Agus Muslim,*Faktor-Faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar2013*, 2013, diakses dari http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf.

mengetahui sejauh mana persepsi pemilih pemula terhadap citra partai politik dan keterpercayaan kandidat presiden berpengaruh pada partisipasi politik pemilih pemula.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala partisipasi politik, skala persepsi terhadap citra partai politik dan skala keterpercayaan kandidat presiden. Hasil yang diperoleh menunjukkan secara bersama-sama persepsi pemilih pemula terhadap citra partai politik dan keterpercayaan kandidat presiden mampu berperan sebesar 35,8 % dalam memprediksi partisipasi politik pemilih pemula dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara lakilaki dan perempuan dalam partisipasi politik[5].

Penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul hubungan iklan politik pemilu di televisidengan partisipasi politik pemilih pemula muslim dalam pelaksanaan pemilu presiden 2014 di Dusun Krajan Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian korelasionar yang berusaha menemukan bukti empiris terhadap hubungan iklan politik pemilu di televisidengan partisipasi politik pemilih pemula muslim dalam pelaksanaan pemilu presiden 2014 di Dusun Krajan Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

[5]Amul Husni Fadlan,*Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Ditinjau dari Persepsi Terhadap Citra Partai Politik dan Keterpercayaan Kandidat Presiden*, 2014, abstrak tesis, diakses dari http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70869&is_local=1.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Televisi

a. Media Televisi Sebagai Komunikasi Massa

Media televisi lahir karena perkembangan teknologi. Bermula dari ditemukannya elechtrische teleskop sebagai perwujudan gagasan seseorang mahasiwa dari Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul Nipkov, untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini terjadi antara tahun 1883-1884.Akhirnya Nipkov diakui sebagai bapak televisi.

Televisi merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa. Adapun ciri-ciri komunikasi massa adalah meliputi[6]:

1) Komunikasi berlangsung satu arah.
2) Komunikatornya merupakan lembaga, yakni kelompok yang terorganisir, yang nampak di pembagian tugas dan pemberian wewenang.
3) Pesannya bersifat umum, artinya bukan rahasia (dapat diketahui umum).
4) Penyebaran pesaannya bersifat serempak.

b. Iklan di Media Televisi

Klepper menyatakan bahwa iklan dan advertising berasal dari bahasa Latin, advere berarti mengoperkan pikiran dan gagasan kepada

[6]http://generationofscience.blogspot.com/2012/04/ciri-ciri-komunikasi-massa.html

pihak lain Institut Praktis Periklanan Inggris mendefinisikan istilah periklanan sebagai berikut: periklanan merupakan pesan-pesan penjual yang paling persuasif, yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya[7]. Masyarakat Periklanan Indonesia mendefisinikan iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang di sampaikan lewat media, ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat[8].

Media televisi merupakan salah satu media iklan yang efektif untuk menyampaikan pesan iklan kepada konsumen potensial.Media televisi merupakan media yang cukup efektif untuk menyampaikan iklan produk, positioning iklan tersebut dalam sela-sela program siaran televisi.Maka semakin banyak waktu yang dihabiskan pemirsa untuk melihat iklan dalam media tersebut.Bentuk siaran dalam media televisi sangat tergantung dari berbagai bentuk siaranya, apakah merupakan darisuatu sindikat, jaringan lokal, kabel atau bentuk lainya.

Media televisi menimbulkan dampak yang kuat terhadap konsumen dalam hal menciptakan kelenturan dengan mengkombinasikan audio visual sehingga iklan dapat dikemas dalam bentuk yang menarik. Iklan media televisi dapat mempengaruhisikap danpersepsi konsumen sasaran dimana banyak konsumen potensial melangkan waktu di depan televisi sebagai sumber berita dan informasi. Sebagai media penyiaran, keunikan

[7]Jefkins, Frank, *Periklanan*, Terjemahan oleh Haris Munandar, Edisi Ketiga, (Jakarta: Erlangga), hlm. 5.

[8]RhenaldKasali, op cit, hlm. 22.

televisi adalah sangat personal dan demonstratif, tetapi juga sangat mahal dan di anggap penyebab ketidak teraturan (*clutter*) dalam persaingan.

Seperti media lainya, periklanan di telavisi mempunyai sejumlah kekuatan, antara lain:[9]

1) Televisi mempunyai kemampuan yang unik untuk mendemonstrasikan penggunn produk.
2) Televisi juga mempunyai kemampuan untuk muncul tanpa diharapkan (instusion value).
3) Kemampuan televisi untuk memberikan hiburan dan menghasilkan kesenangan.
4) Kemampuan televisi untuk menjangkau para konsumen satu-persatu.
5) Televisi dapat menanyakan humor sebagai starategi periklanan yang efektif.
6) Periklanan dengan menggunakan televisi sangat efektif dengan tenaga penjualan perusahaan dan perdagangan.

Iklan politik dapat dikatetogorikan dalam beberapa kelompok[10]:

1) Iklan *primitif*; dibuat pada masa lampau dengan teknik yang masih sangat sederhana
2) *Talking heads*; menyoroti suatu isu dan meyakinkan bahwa seorang kandidat akan mampu menangani isu tersebut
3) *Iklan negatif*; menyerang kebijakan kandidat atau partai lawan
4) *Iklan konsep*; menggambarkan ide-ide besar kandidat atau partai

[9]Terence Shimp, *Periklanan Promosi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 535 – 536.

[10]Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 1999), hlm. 97.

5) *Cinema-verite*; kejadian sehari-hari antara kandidat dengan rakyatnya

6) *Iklan kesaksian*; kesaksian terhadap kandidat atau partai dari orang bisaa atau orang terkenal

7) *Reporter netral*; laporan mengenai kandidat atau partainya dan membiarkan *audiens* memberi penilaian sendiri.

2. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi pemilih pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.[11]

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar inilah yang digunakan warga masyarakat agar dapat ikut serta dalam menentukan isi politik. Prilaku-prilaku yang demikian dalam konteks politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

[11]Sudijono Sastroatmodjo,*op cit*, hlm. 67.

Menurut Hutington dan Nelson, sebagaimana dikutip Budiarjo bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah.Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan sepontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan.Legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.[12]

Menurut Davis, partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya.[13]

Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pemimpinan.

Surbakti memberikan pengertian partisipasi politik sebagai segala keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.[14] Kemudian Budiardjo menyebutkan bahwa “Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan

[12]Mariam Budiardjo,*Partsisipasi dan Partai Politik*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 3.
[13]Sudijono Sastroatmodjo,*op cit*, hlm. 85.
[14]Ramlan Surbakti, op cit., hlm. 140.

politik, antara lain seperti memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah."[15]

Dari pengertian mengenai partisipasi politik diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya.Bentuk patisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.[16]

Dalam bukunya Michael Rush ada beberapa bentuk-bentuk partisipasi politik diantaranya sebagai berikut[17]:

a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
b. Mencari jabatan politik atau administrasi
c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dsb
h. Partisipasi dalam diskusi politik internal

[15]Mariam Budiardjo,op cit., hlm. 367.
[16]Raga Rafael Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 148.
[17]Ibid hlm. 148.

i. Partisipasi dalam diskusi politik eksternal

j. Partisipasi dalam pemungutan suara

Sastroatmodjo juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutanatau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.[18]

Sementara itu Maribath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:[19]

a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
b. Spektator, adalah rang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk.Bentuk-bentuk partisipasi politik yang

[18]Sudijono Sastroatmodjo, *op cit*, hlm. 77.

[19]A. Rahman H.I, *Sistem Polik Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 289.

terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner.Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidak puasan warga negara.[20]

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidak puasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional[21].Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

a. Partisipasi politik konvensional
    1) Pemberian suara atau voting
    2) Diskusi politik
    3) Kegiatan kampanye
    4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

[20]A. Rahman H.I,*Sistem Polik Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 287.
[21]Syarbaini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 70.

5) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

b. Partisipasi politik nonkonvensional

1) Pengajuan petisi
2) Berdemonstrasi
3) Konfrontasi
4) Mogok
5) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda: pengrusakan, pemboman, pembakaran
6) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Kemudian David F. Roft dan Frank mengatakan bahwa bentuk partisipasi warga Negara dapat dilihat berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai partisipan. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik[22].

[22]A. Rahman H.I,*Sistem Polik Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 286.

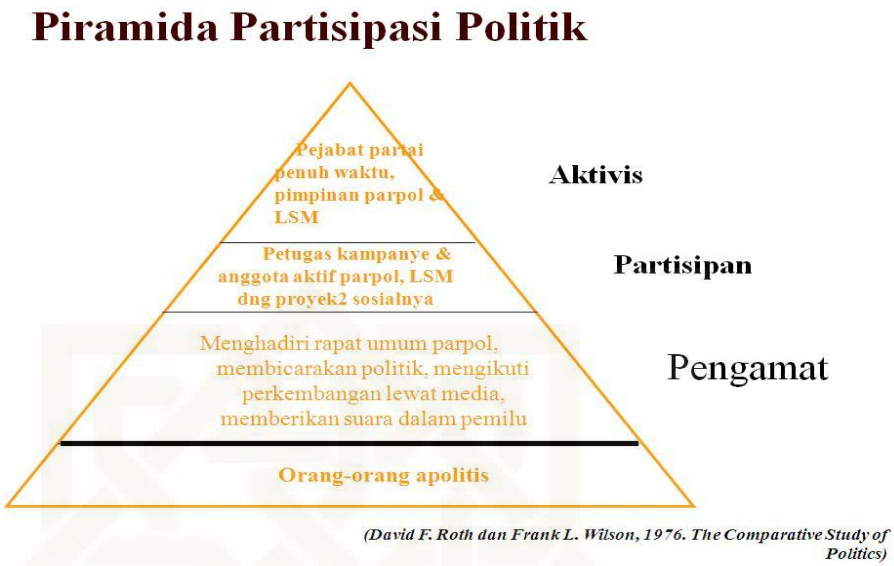

Tabel 3 : Piramida partsipasi politik
Sumber : A. Rahman H.I. 2007

Kelompok paling bahwah pada gambar piramida partisipasi politik yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Oleh Roth dan Wilson disebut sebagai kelompok apolitis[23].Kelompok yang berada di atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembanagan lewat media, memberikan suara dalam pemilu.Kemudian satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan.Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial.Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis.Warga yang tergabung dalam kelompok

[23]Ibid, hlm. 287.

ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan.

Ciri utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu latar belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin.Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dalam Pilbup. Serta menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kegiatan politik.

Adapun bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda, dimana para pemuda melakukan aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasa yang dilakukan pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilu yaitu dengan cara bergabung dengan salah satu parpol didaerahnya, mengikuti kegiatan kampanye, menghadiri diskusi politik di daerahnya.

Indikator utama yang dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang dianggap mendasari atau melatar belakangi tingkat partisipasi pemilih pemula adalah tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang tertentu yang dapat diungkap beranekaragam. Keragaman latar belakang tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu, dan menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kehidupan politik. Kegiatan politik yang mencakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bentuk dan intensitas.Dalam konsep demikian termasuk dalamperbedaan jenis partisipasi.Partisipasi secara aktif tidak intensif yaitu

kegiatan yang tidak banyak menyita waktu seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali jumlahnya.Jumlah orang yang secara aktif dan penuh waktu melibatkan diri dalam politik (aktifis politik.Pemimpin partai atau kelompok yang berkepentingan) relatif jumlahnya lebih kecil.

3. Faktor-Faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor.Ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik).Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara.Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll.Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya[24].

Dibanyak negara, pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik mungkin pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemapuan berpolitik. Juga dibanyak negara, lembaga pendidikan dan kurikulumnya sengaja berusaha mempengaruhi proses sosialisasi politik anak-anak didiknya. Hal ini terjadi disemua negara, baik yang komunis, otoriter maupun yang demokratis.

[24]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm.140.

Di samping pendidikan dan perbedaan jenis kelamin setatus sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seorang dalam berpartisipasi politik.Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang bersetatus rendah.[25]

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman beroganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah[26].

Selanjutnya menurut Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni[27]:

a. Modernisasi

   Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan

[25]Mas'oed Mochtar dan Colin Mac Andrew.*Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 61.

[26]Ibid, hlm.144-145.

[27] Sudijono Sastroatmodjo,*Perilaku Politik*, (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), hlm. 84.

kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

b. Terjadi perubahan struktur kelas sosial

   Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industralisasi dan modernisasi.

c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa

   Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntuntan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik

   Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi,sosial dan budaya

   Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Alasan partisipasi politik seseorang bervariasi, yaitu[28]:

Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui

[28]Milbrathdalam Michael Rush dan Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Rajawali, 1989), hlm. 168.

media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutseertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karekteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karekter suku, usia jenis kelain dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional.Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaaan watak dan tingkah laku individu.Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu presiden 2014 memang erat kaitanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya.Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih.Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya. Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang

dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

4. Tujuan Partisipasi Politik

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain.

Waimer menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya pergerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu:[29]

a. Moderenisai disegala bidang, berimplikasi pada komersialisme pertanian, industri, perbaikan pendidikan, pengembangan metode masa, dan sebagainya.
b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja batu yang semakin meluas dalam era industrialisasi dan moderenisasi. Dari hal itu muncul persoalan yaitu siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan-pembuatan keputusankeputusan politik yang akhirnya membawa perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

[29]Sudijono Sastroatmodjo, *op cit.*, hlm. 85.

Kelas menengah baru itu secara praktis menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang terkesan demokratis.

c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa merupakan faktor meluasnya komunikasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisasi akan membagkitkan tuntutantuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang luas mempermudah penyebaran ide-ide seluruh masyarakat. Dengan masyarakat yang belum maju sekalipun akandapat menerima ide-ide politik tersebut secara tepat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan-tuntutan rakyat dalam ikut serta menentukan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpinan politik yang bersaing meperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan masa. Dalam hal mereka beranggapan, adalah sah apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam upaya memperjuangkan ide-ide partisipasi masa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan pers. Dengan demikian pertentangan dan perjuangan kelas menengah kekauasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat.
e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang

berorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi keputusanpolitik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Davis partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi.Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.[30]

Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut:[31]

a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah.Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik

[30]Sudijono Sastroatmodjo, *op cit.*, hlm. 85.
[31]Sudijono Sastroatmodjo, *op cit.*, hlm. 85.

merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

5. Landasan Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson mengemukakan bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah:[32]

a. Kelas: perorangan-perorangan dengan setatus sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa.
b. Kelompok/komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
c. Lingkungan (*neighborhood*): perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
d. Partai: perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atu mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
e. Golongan (*fuction*): perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik diantara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem setatus, kekayaan dan pengaruh yang tidak sedrajat.

Hermawan berpendapat bahwa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku politik, adalah: [33]

[32]Huntington, Samuel P. dan Juan M. Nelson.*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*.(Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.21.

a. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain.
b. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kebribadian aktor seperti keluarga, teman agama, kelas, dan sebagainya.
c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
d. Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain-lain.

6. Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi[34]:

a. partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
b. partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
c. golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggapsistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni[35]:

---

[33]Eman Hermawan. Politik Membela Yang Benar.(Yogyakarta: Yayasan KLIK, 2001), hlm. 72.

[34] A. Rahman H.I, op cit., hlm. 288.

[35] Cholisin,*Dasar Dasar Ilmu Politik*. (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 152.

a. Partisipasi politik apatis

   Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

b. Partisipasi politik spector

   Orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

c. Partisipasi politik gladiator

   Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

d. Partisipasi politik pengritik

   Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partsipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis.

Pemberian suara dalam pilbup merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa.Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Sedangkan Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama startifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu

pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasin(orang yang jarang melakukan partisipasi politik)[36].

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif.individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah,melakukan hura-hura, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah.Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit.Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.

[36]A. Rahman H.I, op cit., hlm. 289.

Partisipasi politik di negara-negara berkembang cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan.Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengudang perhataian dari berbagai kalangan.

7. Bentuk Partisipasi Politik

Paige merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif[37].

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi.Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis).Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Selanjutnya menurut Michael Rush ada beberapa bentuk-bentuk partisipasi politik diantaranya sebagai berikut[38]:

a. Menduduki jabatan politik atau administrasi

b. Mencari jabatan politik atau administrasi

[37]Cholisin, op cit., hlm. 153.
[38]Raga Rafael Maran, op. cit., hlm. 148.

c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik

d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik

e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik

f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik

g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dsb

h. Partisipasi dalam diskusi politik internal

i. Partisipasi dalam diskusi politik eksternal

j. Partisipasi dalam pemungutan suara

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidak puasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional.Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional[39].

a. Partisipasi politik konvensional

1) Pemberian suara atau voting

2) Diskusi politik

[39]Syarbaini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 70.

3) Kegiatan kampanye

4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

5) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

b.Partisipasi politik nonkonvensional

1) Pengajuan petisi

2) Berdemonstrasi

3) Konfrontasi

4) Mogok

5) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran

6) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

8. Pemilu

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.Dalam demokrasi moderen yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat.Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum.Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.[40]

[40]Ibid, hlm.80.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu.Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.[41]

Dari pengertian diatas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2009 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung wakil-wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presidennya.

[41]Moh.Kusnardi dan Harmailiy Ibrahim.Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.(Jakarta: Sinar Bakti, 1994), hlm. 329.

Berdasarkan pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas pemilu adalah:

a. Langsung

   Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

   Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian)

c. Bebas

   Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun.Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

   Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suarnanya akan di berikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilu merupakan mekanisme politik untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik yang dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu tertentu dengan berdasarkan kepada prosedur yang telah disepakati dan disahkan dalam Undang-Undang (UU) yang sering ditandai oleh adanya peralihan kekuasaan kepemimpinan nasional. Idealnya pemilu dimaksudkan untuk mencari *general will* dalam masyarakat, Pemilu mengedepankan kuantitas suara sebagai basis utama untuk mengesahkan perubahan kekuasaan yang terjadi. Fungsi Pemilu menurut Ramlan Surbakti adalah sebagai berikut[42]:

a. Pemilu merupakan sarana politik yang berfungsi memberikan kesempatan kepada warga negara guna memilih pemerintahan yang diinginkan dan sekaligus membatasi perilaku pemerintah. Akuntabilitas calon pemegang kekuasaan akan dinilai oleh pemilih pada saat proses pemungutan suara

[42]Ramlan Surbakti, op cit., hlm. 92.

yang kemudian menjadi gambaran pemerintahan yang diinginkan masyarakat luas.

b. Pemilu berfungsi memberi legitimasi atau pengesahan terhadap proses peralihan kekuasaan. Artinya, pihak pemenang Pemilu telah diberi kesempatan yang sah secara hukum dan politik untuk membentuk pemerintahan yang baru.
c. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana perubahan politik secara damai. Hal ini dapat diartikan bahwa pergantian pemegang kekuasaan sebagai hasil dari pelaksanaan Pemilu tidak harus diikuti terjadinya gejolak sosial-politik yang tinggi.
d. Pelaksanaan Pemilu mengundang hadirnya partisipasi politik warga Negara sebab partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam Pemilu sebagai indikasi berjalannya proses demokratisasi. Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai bentuk keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: "singlemember constituency(satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik) dan multi-member constituency(satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Proportional Representation atau Sitem Perwakilan Berimbang)".[43]

[43]A. Rahman H.I, op cit., hlm. 151.

a. Single-member constituency(Sistem Distrik)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat.Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik.

b. Multi-member constituency (Sitem Perwakilan Berimbang)

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan proportional representation atau sitem perwakilan berimbang.Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik.Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuaidengan jumlah suara yang diperolehnya.Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan.[44]

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dimana dengan adanya sistem pemilihan umum yang bebas untuk membentuk dan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis.Hal ini sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia bagaimana tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan

[44]A. Rahman H.I, op cit., hlm. 152.

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar dan memberi jaminan bagi keikutsertaan seluruh warga Negara adalah memberikan suara dalam Pemilu.Penelitian yang dilakukan difokuskan pada bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan kelompok pemilih Pemilu dalam Pemilu Presiden 2004. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut[45]:

a. Partisipasi Konvensional

Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional antara lain mengikuti proses pemungutan suara (*voting*), diskusi-diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung secara resmi dalam *political groups*, serta komunikasi individu dengan pejabat politik atau administrasi.

b. Partisipasi Non-Konvensional

Bentuk-bentuk partisipasi non-konvensional antara lain pengajuan petisi, berdemontrasi, konfrontasi, mogok, melakukan tindak kekerasan politik, serta perang gerilya dan revolusi.

9. Pemilih Pemula

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih pemula terdiri dari dua

[45]Gabriel A. Almond dalam Mochtar Mas'oed dan Collin Mac Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 88.

kata, yakni pemilih dan pemula[46].Pemilih adalah orang yang memilih. Sedangkan pemula adalah orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu.Pemilih pemula merupakan pemilih yang berusia antara 17-21 tahun atau baru pertama kali ikut dalam pemilu[47].

Menurut pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008, Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) atau lebih sudah/pernah kawin. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No.10 Tahun 2008 merangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara pemilih genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pengetahuan mereka dengan pemilih lainnya tidak jauh berbeda hanya saja antusiasme dan preferensi.

10. Konsep partisipasi dalam Islam

Semua individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu.Siapa saja yang mereka pilih untuk jabatan ini, maka menurut syara' dia adalah kepala negara. Ada salah satu pendapat dari ahli fiqh yakni, "Siapa saja yang kepemimpinannya dan prasetianyadisepakati kaum muslimin, maka kepemimipinannya itu sah dan wajib membelanya".[48]Jadi, kepala negara adalah seseorang yang dipilih dan disetujui oleh masyarakat dan kekuasaannya berasal dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

[46]Pahmi Sy.op cit., hlm. 54.
[47]Maesur Zaky. op cit., hlm. 14.
[48]Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*,Alih bahasa oleh Abdul Aziz, (Jakarta: Yayasan Al-amin, 1984), hlm. 17.

Adapun landasan untuk berpartisipasi adalah berasal dari prinsip musyawarah yang ditetapkan syari'at dan prinsip tanggungjawabmasyarakat dalam melaksanakan hukum syara' dan mengelola urusan mereka sesuai dengan hukum syara'.[49] Prinsip musyawarah di sebutkan dalam Q. S Syura ayat 38 yang terjemahannya sebagai berikut:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٣)

Artinya:

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (16: 93)

Dalam pelaksanan musyawarah untuk menentukan pilihannya masing-masing, semua individu harus berpartisipasi dan tidak dibedakan statusnya.Untuk dapat berpartisipasi mereka harus memenuhi syarat.Mereka yang tidak termasuk memenuhi syarat menurut petunjuk syari'at adalah seperti anak kecil, orang gila, atau nonmuslim.[50]

Umat boleh berpartisipasi secara langsung atau melalui perantara, misalnya, diwakili oleh orang lain yang dilaksanakannya, karena pemilik hak tidak harus melaksanakannya sendiri, tetapi boleh diwakilkan kepada orang lain.[51]

[49]Ibid, 18.
[50]Abdul Karim,Masalah Kenegaraan, hlm. 24.
[51]Ibid, 25.

Dalam Islam semua umat mempunyai hak untuk memilih, akantetapi untuk bisa menggunakan hak pilihnya mereka harus memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat yang diperlukan adalah seperti yang dikemukakan Ibnu Farabi, yaitu: (1) Lengkap anggota badannya; (2) Baik daya pemahamannya; (3) Tinggi intelektualitasnya; (4) Pandai mengemukakan pendapat dan mudah mengerti pemahamannya; (5) Pencinta pendidikan dan gemar membaca; (6) Tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita; (7) Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan; (8) Berjiwa besar dan berbudi luhur; (9) Tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan duniawi; (10) Pecinta keadilan dan benci kezaliman; (11) Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melaksanakan atau menyetujui tindakan keji dan kotor; dan (12) Kuat terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan penuh keberanian, tidak antusiasme bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.[52]

Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam as-Sultaniyah, memberikan syarat-syarat untuk bisa dipilih menjadi seorang pemimpin, meliputi: (1) Adil dalam segala bidang; (2) Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum; (3) Sehat panca indera (telinga, mata dan mulut) agar dapat menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya; (4) Sehat dari organ tubuh yang menghalanginya untuk bertindak dengan sempurna dan cepat; (5) Wawasan yang membuatnya

[52]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), hlm. 56.

mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan; (6) Berani dan tegas dalam membela Negara dan menghadapi musuh; dan (7) Berasal dari keturunan kaum Quraisy.[53]

Keharusan keturunan kaum Quraisy dalam persyaratan untuk bisa menggunakan hak pilihnya sebagai seorang pemimpin bukanlan persyaratan yang mutlak. Banyak para sarjana dan ulama telah mengemukakan alasannya bahwa kaum muslimin semua adalah saudara, mereka mempunyai kedudukan, kewajiban dan hak yang sama. Karena itu secara umum dapat diambil pengertian bahwa untuk bisa dipilih oleh seorang pemimpin, seseorang harus memenuhi syarat yangmeliputi; sifat yang adil, mempunyai ilmu pengetahuan untuk dapat melaksanakan hukum Allah, sehat jasmani dan bebas cacat badan, kesesuaian dan kesanggupan dalam membela kepentingan umat dan hukum Allah.

Pemilu beserta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya pada dasarnya merupakan aktifitas politik (siyasah). Pemilu tidak lain adalah bentuk musyawarah yang diikuti oleh orang banyak, yangdiselengarakan untuk membentuk lembaga-lembaga penting dalam negara dan pemerintahan, yakni lembaga kepemimipinan atau kepresidenan dan lembaga perwakilan atau parlemen. Jika ada sebagian mereka yang melaksanakan kewajiban itu, maka seluruh anggota komunitas dipandang sudah melaksakan kewajiban itu, maka seluruh anggota komunitas dipandang sudah melaksankan. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakannya,

[53]Imam Al-mawardi,Penerjemah Fadhli Bahri, *Ahkam As-Sulthaniyah*, (Jakarta: As-sulthaniyah, 2007), hlm. 3-4.

maka mereka semuanya berdosa.Berdasarkan pandangan ini, maka kondisi kekosongan pemerintah tidak boleh terjadi di dalam komunitas muslimin.

Menonton iklan politik di televisi menjadi hal yang penting dalam partisipasi pemilih, karena dengan menonton pemilih pemula akan mengetahui bagaimana visi misi calon presiden. Hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan bagi pemilih pemula untuk memilih calon presiden. Semakin ia banyak menonton iklan politik tentang calon presiden A misalnya, semakin tinggi pula tekadnya untuk memilih calon presiden tersebut.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu dugaan, kesimpulan atau jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan. Karena hipotesis ini lahir dari praduga secara teoritis, harus dibuktikan kebenarannya dengan praktik atau adanya penelitian untuk permasalahan yang sebenarnya.

Berdasarkan kerangka teori, penulis mengemukakan hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis nolnya (Ho) sebagai berikut:

Ha : “Tingkat intensitas menonton iklan politik dusun Krajan desa Tirtomartani, kecamatan Kalasan, kabupaten Sleman dalam pilpres 2014 dalam kategori tinggi ”.

Ho : “Tingkat intensitas menonton iklan politik dusun Krajan desa Tirtomartani, kecamatan Kalasan, kabupaten Sleman dalam pilpres 2014 dalam kategori rendah”.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Explanative Research* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan keterangan mengenai suatu permasalahan dan menjelaskan hubungan kausal melalui pengujian hipotesis dan biasanya dalam penelitian ini menggunakan dasar sampel populasi yang ada[54].

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pemula Muslim di Dusun Krajan, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman yang berjumlah 62 orang.

Dalam menentukan ukuran sampel, dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yaitu: apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi[55]. Sampel dalam penelitian ini diambil 62 orang dengan menggunakan teknik *sensus* atau sampel total.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap dalam suatu penelitian maka peneliti dituntut kemampuannya untuk memilih teknik yang tepat.Atas dasar itu maka untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif penyusun menggunakan metode pengumpulan data kuesioner.

---

[54]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES), 2006, hlm. 3.

[55]Suharsimi Arikunto. *Manjemen Penelitian*, Jakarta PT Rineka Cipta, 2010 hlm 67

Kuesioner adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara serangkaian daftar pertanyaan yang telah disusun kapada responden untuk dijawab dan dinilai.Skala kuesioner yang digunakan adalah skala *Likert.*Skla *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial[56].Tidak adanya pilihan jawaban ragu-ragu dengan alasan yaitu kategori tersebut mempunyai arti ganda, bisa diartikan belum memberikan jawaban, netral atau ragu-ragu.Kategori jawaban yang memiliki arti ganda ini tidak diharapkan dalam instrument[57].

Dengan demikian penelitian ini menggunakan penskalaa model *Likert* yang telah dimodifikasi dengan menghilangkan jawaban tengah atau ragu-ragu. Kemudian masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan diberi nilai sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Likert

Nilai	Pendapat
4	Sangat Setuju (SS)
3	Setuju (S)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa statistik deskriptif, yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan data dalam bentuk angka-angka. Penulis juga menggunakan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan menggunakan

[56]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: CV Alfabeta), 2004, hlm. 86.
[57]Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 2004) hal. 20.

kata-kata atau kalimat. Analisa kualitatif ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari data yang dideskripsikan dengan angka-angka sehingga lebih mudah dipahami.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan menonton iklan politik di dalam pelaksanaan pemilu Presiden 2014 di Dusun Krajan, Desa Tiromartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sedang. Partisipasi politik pemilih pemula Muslim dalam pelaksanaan pemilu Presiden 2014 diDusun Krajan, Desa Tiromartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman juga termasuk dalam kategori sedang.

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Tim Sukses Calon Presiden supaya dalam pembuatan iklan hendaknya memperhatikan kualitas dari iklan tersebut untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula Islam terutama terhadap calonnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar penelitian dikembangkan kepada variabel lain yang diduga mempengaruhi partisipasi politik misalnya kesadaran politik, apresiasi kebijakan pemerintah dan sebagainya dengan analisis yang lebih mendalam (*in-depth*).

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. 1981. *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3S.

Azwar, S. 2008. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiardjo, Miriam. 11997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Partisipasi Politik dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.

Cholisin. 2007. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.

Combs, James E dan Dan *Nimmo*. *1994*. *Propaganda Baru: Kediktatoran Perundingan Dalam Politik. Masa Kini*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Dan, Nimmo. 1970. *The Political Persuader.* New York: Prentice – Hall.

Dawson, R. E., Prewitt, K., dan Dawson, K. S. 1977. *Political Socialization*. 2nd edition. Boston and Toronto: Little Brown and Co.

Deddy Djamaludin *Malik* & Yosal *Iriantara*. *1994*. *Komunikasi Persuasif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Deddy Mulyana, 1999. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: *PT. Remaja* Rosdakarya.

Douglas J. Goodman & George Ritzer. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Herbert McClosky. *International Encylcopaedia of the social Sciences, Herbert*. Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hungtinton, Samuel P, & Joan Nelson. 1997. Partisipasi Politik di Negara perkembang. Jakarta: Rineka Cipta.

Kasali, Rhenald. *1992*. *Manajemen Periklanan Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Maesur Zaky. 2009. *Buku Panduan Pendidikan Bagi Pemilih Pemula*. Yogyakarta: PKBI DIY.

Maran, Raga Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moriarty, Sandra. *1991*, *Creative Advertising*, New Jersey: Prentice Hall.

Nasiwan. 2010. *Teori-Teori Politik Indonesia: Sebuah Buku Pengantar Sederhana, Komplit dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: UNY Press.

Pahmi Sy. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: GP Press.

Putra, I Gusti Ngurah. 1999. Manajemen Hubungan Masyarakat. Yogyakarta: Andi Offset.

Rahman H.I, A. 2007. *Sistem Polik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rohrscheneider, 2002. *Mobilizing versus chasing: how do parties target voters in election campaigns?* Electoral Studies, 21:367-382.

Rush, Michael, & Philip Althoff. 1989. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Sekertariat Jendral KPU. 2010. *Modul: Pemilih Untuk Pemula*. Jakarta: KPU.

Sigit, Soehardi. 2001. *Pengantar Metodologi Penelitian: Sosial, Bisnis, Manajemen*. Yogyakarta: BPEF UST.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Sudijono Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik.* Semarang: Ikip Semarang Press.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.

Suharno .2004. *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: UNY.

Suhartono. 2009. *Hasil Penelitian Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada*. Hlm 6.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syarbaini. 2007. *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wells, W., *Burnett*, J., & *Moriarty*, S. 1998. Advertising: Principles and Practice. Second Edition. Prentice Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey.

Wilmshurst, John. 1993. *Below-the-line Promotion*. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd.

Daftar Sumber Internet dan Koran

http://pemilu.sindonews.com/

Hobbes, htt://www.imba.org

htt://www.ethics.state.tx.us

http://campus.chamlain.edu

http://election.dos.state.fl.us

Passewitz & Bull, htt://content.ag.ohio-state.edu

Whit Hobbes, htt:www.imba.org

www.indonesiamemilih.com

DAFTAR PERTANYAAN

Jawablah semua pertanyaan dengan memberi tanda silang (X) *pada kotak yang telah disediakan*

A. Profil Responden

1. Nama responden:
2. Jenis kelamin responden:
    a. Pria
    b. wanita
3. Pendidikan:

B. INTENSITAS MENONTON IKLAN POLITIK DI TELEVISI (X)

Pernyataan	SS	S	TS	STS
1. Apakah anda setiap hari menyaksikan iklan pemilu di televisi				
2. Apakah anda menyaksikan iklan pemilu di televisi lebih dari 2 kali dalam 1 jam				
3. Apakah anda menyaksikan iklan pemilu di televisi lebih dari 10 kali dalam seminggu				
4. Apakah anda sering menghentikan aktifitas pada saat anda menyaksikan iklan pemilu di televisi				
5. Apakah anda menyaksikan iklan pemilu di televisi dari awal hingga selesai.				
6. Apakah anda memahami isi pesan yang di sampaikan dalam iklan pemilu di televisi.				
7. Menurut anda apakah iklan pemilu ini mudah di ingat oleh pemirsa.				
8. Menurut anda tayangan iklan pemilu di televisi menarik di saksikan dengan serius.				
9. Apakah tayangan iklan pemilu dapat menarik perhatian anda.				
10. Menurut anda apakah iklan pemilu di televisi memberikan masukan untuk pemilihan presiden nantinya.				

C. INDIKATOR PARTISIPASI POLITIK (Y)

Pernyataan	SS	S	TS	STS
1. Apakah anda menghadiri kampanye calon presiden				
2. Apakah anda memakai atribut salah satu calon presiden saat berkampanye				
3. Apakah anda mengajak teman untuk menghadiri kampanye calon presiden				
4. Apakah anda memperhatikan dengan baik materi kampanye calon presiden				
5. Apakah anda menghadiri diskusi kelompok untuk membahas calon presiden				
6. Apakah anda memperhatikan dengan baik setiap orang yang mebicarakan calon presiden				
7. Apakah anda sering bertukar fikiran dengan teman tentang calon presiden				
8. Apakah anda hadir dalam pemungutan suara pemilihan presiden				
9. Apakah anda memberikan suara anda dalam pemilihan presiden				

DATA PENELITIAN

Resp	Intesitas menonton iklan politik (X)											
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	Juml	Rata2
1	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	23	2,30
2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	33	3,30
3	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	15	1,50
4	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	27	2,70
5	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	15	1,50
6	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	33	3,30
7	3	3	2	3	2	4	3	3	3	2	28	2,80
8	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28	2,80
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1,00
10	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	30	3,00
11	3	2	2	2	3	4	3	2	4	4	29	2,90
12	2	2	2	2	2	2	3	1	2	1	19	1,90
13	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	36	3,60
14	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	15	1,50
15	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	36	3,60
16	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	27	2,70
17	4	3	4	3	4	4	2	3	3	3	33	3,30
18	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	31	3,10
19	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	25	2,50
20	1	2	1	3	4	3	1	2	2	1	20	2,00
21	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	35	3,50
22	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	30	3,00
23	2	3	3	3	4	3	3	3	3	2	29	2,90
24	4	3	3	3	2	3	3	2	3	3	29	2,90
25	4	3	3	2	2	1	4	4	4	4	31	3,10
26	1	1	1	4	3	4	3	2	3	3	25	2,50
27	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	28	2,80
28	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	34	3,40
29	2	2	2	2	3	2	1	2	2	2	20	2,00
30	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	31	3,10
31	3	4	4	3	2	3	1	1	1	2	24	2,40
32	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	26	2,60
33	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	25	2,50
34	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	35	3,50
35	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	37	3,70
36	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	34	3,40
37	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	26	2,60
38	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	17	1,70
39	4	3	3	3	4	3	4	4	2	2	32	3,20
40	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	32	3,20
41	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	27	2,70
42	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	34	3,40
43	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	29	2,90
44	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	14	1,40
45	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	36	3,60
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3,00
47	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	27	2,7
48	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	28	2,8
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
50	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	27	2,7
51	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	37	3,7
52	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	2
53	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	32	3,2
54	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	37	3,7
55	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	26	2,6
56	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	31	3,1
57	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	27	2,7
58	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	16	1,6
59	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	22	2,2
60	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	35	3,5
61	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	20	2
62	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	25	2,5

Resp	Partisipasi politik (Y)										
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Juml	Rata2
1	3	3	3	3	4	4	3	3	3	29	3,22
2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	3,89
3	1	1	2	1	1	1	2	1	1	11	1,22
4	2	2	2	2	3	2	3	2	2	20	2,22
5	2	2	3	3	2	2	2	2	2	20	2,22
6	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28	3,11
7	3	3	3	3	3	3	3	3	2	26	2,89
8	3	3	2	2	3	2	3	3	3	24	2,67
9	2	3	3	2	2	2	1	1	2	18	2,00
10	3	3	3	3	3	2	3	2	3	25	2,78
11	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26	2,89
12	1	1	1	1	2	2	2	2	2	14	1,56
13	3	2	3	3	2	3	3	3	3	25	2,78
14	2	2	1	1	2	2	2	1	2	15	1,67
15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	2,00
16	2	2	2	2	3	2	3	3	2	21	2,33
17	2	2	2	3	2	3	4	3	3	24	2,67
18	2	2	3	3	2	3	3	3	3	24	2,67
19	4	4	4	1	2	1	2	1	1	20	2,22
20	2	2	2	3	2	3	2	2	2	20	2,22
21	3	2	3	2	3	3	4	3	4	27	3,00
22	2	2	2	3	2	2	1	1	1	16	1,78
23	1	1	1	2	2	2	2	2	2	15	1,67
24	3	2	3	3	4	4	2	3	2	26	2,89
25	2	2	3	4	3	3	1	2	1	21	2,33
26	2	2	3	4	3	3	3	2	3	25	2,78
27	1	1	2	2	3	2	2	2	2	17	1,89
28	2	2	2	3	2	2	3	3	3	22	2,44
29	2	2	3	3	3	3	3	3	2	24	2,67
30	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28	3,11
31	3	3	3	2	3	2	1	1	2	20	2,22
32	3	3	2	2	2	2	3	2	3	22	2,44
33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	2,00
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3,00
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3,00
36	3	3	3	3	4	3	4	3	3	29	3,22
37	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28	3,11
38	2	2	2	1	1	2	2	1	1	14	1,56
39	2	2	3	3	3	3	2	2	2	22	2,44
40	4	4	4	4	3	3	4	3	4	33	3,67
41	2	2	2	2	2	1	1	1	1	14	1,56
42	3	2	3	3	2	3	2	2	2	22	2,44
43	2	2	2	3	2	3	2	3	2	21	2,33
44	1	1	1	1	2	1	1	2	1	11	1,22
45	3	2	3	3	2	3	3	2	3	24	2,67
46	2	2	3	2	3	3	3	3	3	24	2,67
47	2	2	3	3	2	2	2	2	1	19	2,1111
48	2	3	2	2	2	2	2	2	2	19	2,1111
49	3	3	4	3	4	4	3	4	4	32	3,5556
50	3	3	3	4	3	3	3	4	3	29	3,2222
51	4	4	4	4	3	3	4	4	3	33	3,6667
52	1	1	1	1	2	2	1	1	1	11	1,2222
53	3	4	3	3	3	3	3	3	3	28	3,1111
54	3	4	4	4	3	3	3	3	4	31	3,4444
55	2	2	2	1	2	1	2	1	2	15	1,6667
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4
57	2	2	2	2	3	2	3	2	2	20	2,2222
58	1	2	2	1	2	2	1	1	2	14	1,5556
59	3	3	3	3	3	3	2	2	3	25	2,7778
60	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34	3,7778
61	3	3	3	2	2	3	3	2	3	24	2,6667
62	1	1	1	2	1	1	1	2	1	11	1,2222

HASIL UJI VALIDITAS

Correlations

		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X
X.1	Pearson Correlation	1	,720**	,701**	,574**	,490**	,855**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
X.2	Pearson Correlation	,720**	1	,718**	,600**	,464**	,807**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
X.3	Pearson Correlation	,701**	,718**	1	,574**	,403**	,763**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,001	,000
	N	62	62	62	62	62	62
X.4	Pearson Correlation	,574**	,600**	,574**	1	,527**	,768**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
X.5	Pearson Correlation	,490**	,464**	,403**	,527**	1	,679**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000		,000
	N	62	62	62	62	62	62
X	Pearson Correlation	,855**	,807**	,763**	,768**	,679**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	62	62	62	62	62	62

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	X
X.6	Pearson Correlation	1	,533**	,462**	,551**	,507**	,751**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
X.7	Pearson Correlation	,533**	1	,681**	,705**	,702**	,819**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
X.8	Pearson Correlation	,462**	,681**	1	,651**	,610**	,802**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
X.9	Pearson Correlation	,551**	,705**	,651**	1	,727**	,795**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
X.10	Pearson Correlation	,507**	,702**	,610**	,727**	1	,806**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	62	62	62	62	62	62
X	Pearson Correlation	,751**	,819**	,802**	,795**	,806**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	62	62	62	62	62	62

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,866**	,806**	,563**	,595**	,851**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
Y.2	Pearson Correlation	,866**	1	,767**	,493**	,538**	,777**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
Y.3	Pearson Correlation	,806**	,767**	1	,670**	,613**	,840**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
Y.4	Pearson Correlation	,563**	,493**	,670**	1	,557**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	62	62	62	62	62	62
Y.5	Pearson Correlation	,595**	,538**	,613**	,557**	1	,786**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	62	62	62	62	62	62
Y	Pearson Correlation	,851**	,777**	,840**	,781**	,786**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	62	62	62	62	62	62

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y
Y.6	Pearson Correlation	1	,580**	,731**	,690**	,820**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62
Y.7	Pearson Correlation	,580**	1	,766**	,812**	,807**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	62	62	62	62	62
Y.8	Pearson Correlation	,731**	,766**	1	,746**	,842**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	62	62	62	62	62
Y.9	Pearson Correlation	,690**	,812**	,746**	1	,861**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	62	62	62	62	62
Y	Pearson Correlation	,820**	,807**	,842**	,861**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	62	62	62	62	62

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HASIL UJI RELIABILITAS

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	62	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	62	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,930	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X.1	24,89	34,528	,805	,918
X.2	24,90	37,269	,760	,921
X.3	24,87	37,655	,705	,924
X.4	24,81	37,995	,715	,923
X.5	24,92	37,879	,597	,929
X.6	24,82	37,263	,685	,925
X.7	24,79	35,906	,764	,920
X.8	24,95	37,030	,751	,921
X.9	24,89	37,446	,745	,922
X.10	24,82	36,443	,752	,921

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
27,63	45,254	6,727	10

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	62	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	62	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,938	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	20,13	31,295	,806	,928
Y.2	20,16	32,269	,715	,934
Y.3	19,94	31,373	,792	,929
Y.4	20,03	31,769	,715	,934
Y.5	20,00	32,885	,733	,933
Y.6	20,06	32,324	,772	,931
Y.7	20,08	31,452	,748	,932
Y.8	20,21	31,119	,792	,929
Y.9	20,16	30,859	,817	,928

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22,60	39,818	6,310	9

HASIL ANALISIS DESKRIPTIF

Statistics

		Intensitas menonton iklan politik (X)	Partisipasi pemilih (Y)
N	Valid	62	62
	Missing	0	0
Mean		27,63	22,60
Std. Error of Mean		,854	,801
Median		28,00	23,00
Mode		27	24
Std. Deviation		6,727	6,310
Variance		45,254	39,818
Range		30	25
Minimum		10	11
Maximum		40	36
Sum		1713	1401

Statistics

		Intensitas menonton iklan politik (X)	Partisipasi pemilih (Y)
N	Valid	62	62
	Missing	0	0
Mean		2,7629	2,5110
Std. Error of Mean		,08543	,08906
Median		2,8000	2,5550
Mode		2,70	2,67
Std. Deviation		,67271	,70123
Variance		,453	,492
Range		3,00	2,78
Minimum		1,00	1,22
Maximum		4,00	4,00
Sum		171,30	155,68

HASIL DISTRIBUSI FREKUENSI

X.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	17	27,4	27,4	27,4
	Setuju	21	33,9	33,9	61,3
	Tidak setuju	15	24,2	24,2	85,5
	Sangat tidak setuju	9	14,5	14,5	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

X.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	7	11,3	11,3	11,3
	Setuju	37	59,7	59,7	71,0
	Tidak setuju	12	19,4	19,4	90,3
	Sangat tidak setuju	6	9,7	9,7	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

X.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	9	14,5	14,5	14,5
	Setuju	34	54,8	54,8	69,4
	Tidak setuju	14	22,6	22,6	91,9
	Sangat tidak setuju	5	8,1	8,1	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

X.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	11	17,7	17,7	17,7
	Setuju	31	50,0	50,0	67,7
	Tidak setuju	18	29,0	29,0	96,8
	Sangat tidak setuju	2	3,2	3,2	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

X.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	14	22,6	22,6	22,6
	Setuju	20	32,3	32,3	54,8
	Tidak setuju	24	38,7	38,7	93,5
	Sangat tidak setuju	4	6,5	6,5	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

X.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	13	21,0	21,0	21,0
	Setuju	29	46,8	46,8	67,7
	Tidak setuju	15	24,2	24,2	91,9
	Sangat tidak setuju	5	8,1	8,1	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

X.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	15	24,2	24,2	24,2
	Setuju	29	46,8	46,8	71,0
	Tidak setuju	11	17,7	17,7	88,7
	Sangat tidak setuju	7	11,3	11,3	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

X.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	9	14,5	14,5	14,5
	Setuju	29	46,8	46,8	61,3
	Tidak setuju	19	30,6	30,6	91,9
	Sangat tidak setuju	5	8,1	8,1	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

X.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	9	14,5	14,5	14,5
	Setuju	32	51,6	51,6	66,1
	Tidak setuju	17	27,4	27,4	93,5
	Sangat tidak setuju	4	6,5	6,5	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

X.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	13	21,0	21,0	21,0
	Setuju	30	48,4	48,4	69,4
	Tidak setuju	13	21,0	21,0	90,3
	Sangat tidak setuju	6	9,7	9,7	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	7	11,3	11,3	11,3
	Setuju	23	37,1	37,1	48,4
	Tidak setuju	24	38,7	38,7	87,1
	Sangat tidak setuju	8	12,9	12,9	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	7	11,3	11,3	11,3
	Setuju	20	32,3	32,3	43,5
	Tidak setuju	28	45,2	45,2	88,7
	Sangat tidak setuju	7	11,3	11,3	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	10	16,1	16,1	16,1
	Setuju	27	43,5	43,5	59,7
	Tidak setuju	19	30,6	30,6	90,3
	Sangat tidak setuju	6	9,7	9,7	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	8	12,9	12,9	12,9
	Setuju	28	45,2	45,2	58,1
	Tidak setuju	17	27,4	27,4	85,5
	Sangat tidak setuju	9	14,5	14,5	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	7	11,3	11,3	11,3
	Setuju	26	41,9	41,9	53,2
	Tidak setuju	26	41,9	41,9	95,2
	Sangat tidak setuju	3	4,8	4,8	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	5	8,1	8,1	8,1
	Setuju	29	46,8	46,8	54,8
	Tidak setuju	22	35,5	35,5	90,3
	Sangat tidak setuju	6	9,7	9,7	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

Y.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	8	12,9	12,9	12,9
	Setuju	25	40,3	40,3	53,2
	Tidak setuju	20	32,3	32,3	85,5
	Sangat tidak setuju	9	14,5	14,5	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

Y.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	6	9,7	9,7	9,7
	Setuju	23	37,1	37,1	46,8
	Tidak setuju	22	35,5	35,5	82,3
	Sangat tidak setuju	11	17,7	17,7	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

Y.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat setuju	7	11,3	11,3	11,3
	Setuju	23	37,1	37,1	48,4
	Tidak setuju	22	35,5	35,5	83,9
	Sangat tidak setuju	10	16,1	16,1	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

CURRICULUM VITAE

Namalengkap	: Nurul Hidayati
TempatdanTanggalLahir	: Semarang, 20 Oktober 1992
JenisKelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
AlamatRumah	: Susukan Semarang
No Handphone	: 089671944926
Email	: nurul2159@yahoo.com
Nama Ayah	: H. Marzuqi
Nama Ibu	: Hj. Turiyah

❖ **PENDIDIKAN**

- SDN I KORIPAN SUSUKAN SEMARANG 1999-2004
- MTsN SUSAKAN SEMARANG 2004-2007
- SMAN 1 SURUH SEMARANG 2007-2010
- KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2010-2015.